

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perkembangan penduduk kota – kota di Indonesia baik sebagai akibat pertumbuhan penduduk maupun akibat urbanisasi telah memberikan indikasi adanya masalah perkotaan yang serius, diantaranya tumbuh kawasan permukiman kumuh. Permukiman kumuh merupakan suatu kondisi kawasan permukiman yang tata letak bangunannya tidak teratur, halamannya yang sempit dan bahkan langsung berbatasan dengan jalan, bangunan yang berdempet serta sarana dan prasarana yang kurang memadai. Berdasarkan aspek sosial, permukiman kumuh ditandai dengan penambahan penduduk yang tinggi, tingkat pendapatan dan kesehatan yang rendah. Kondisi ini mendorong timbulnya kawasan permukiman di daerah perkotaan. Keberadaan kawasan permukiman kumuh di kota – kota besar dan berkembang telah menjadi masalah serius bagi masyarakat maupun pemerintah baik ditinjau dari aspek tata ruang, estetika, lingkungan, dan sosial. Kondisi ini disebabkan oleh adanya budaya masyarakat yang suka hidup mengelompok dan kurang memperhitungkan ruang – ruang untuk fasilitas penunjang kawasan permukiman dalam melakukan pembangunan rumah. Akibatnya kawasan yang terbangun tidak memperhatikan aspek keruangan, lingkungan dan sosial yang berimplikasi memberikan gambaran suatu kawasan permukiman yang kumuh. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia dan merupakan faktor penting dalam peningkatan harkat dan martabat manusia serta mutu kehidupan yang sejahtera dalam masyarakat yang adil dan makmur (Hariyanto, 2015). Perumahan dan permukiman juga merupakan bagian dari pembangunan nasional yang perlu terus ditingkatkan dan dikembangkan secara terpadu, terarah, terencana, dan berkesinambungan. Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang bertumpu pada masyarakat memberikan hak dan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk ikut berperan. Sejalan dengan peran masyarakat di dalam pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, pemerintah dan pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjadi fasilitator, memberikan bantuan dan kemudahan kepada masyarakat, serta melakukan penelitian dan pengembangan yang meliputi berbagai aspek yang terkait, antara lain, tata ruang, pertanahan, prasarana lingkungan, industri bahan dan

komponen, jasa konstruksi dan rancang bangunan, pembiayaan, kelembagaan, sumber daya manusia, kearifan lokal, serta peraturan perundang-undangan yang mendukung menurut (UU No.1/2011). Permukiman dapat pula didefinisikan sebagai kawasan yang didominasi oleh lingkungan hunian dengan fungsi utama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan prasarana dan sarana lingkungan dan tempat kerja yang memberikan pelayanan dan kesempatan kerja untuk mendukung perikehidupan dan penghidupan sehingga fungsi-fungsi perumahan tersebut dapat berdaya guna dan berhasil guna. Masalah di kota yang dituju namun juga menimbulkan masalah di desa yang ditinggalkan. Masalah yang terjadi di kota antara lain yaitu meningkatnya angka kemiskinan sehingga pemukiman kumuhnya juga meningkat, peningkatan urban *crime* dan masih banyak masalah lain. Dalam permukiman kumuh, ada beberapa indikator yang dapat dipakai untuk mengetahui apakah suatu kawasan tergolong kumuh atau tidak diantaranya dengan melihat tingkat kepadatan kawasan, kepemilikan lahan dan bangunan. Selain itu, kualitas sarana dan prasarana yang ada dalam kawasan tersebut. Namun, kondisi kumuh tidak dapat digeneralisasi antara satu kawasan dengan kawasan lain karena kumuh bersifat spesifik dan sangat bergantung pada penyebab terjadinya kekumuhan. Tidak selamanya kawasan yang penduduknya jarang atau kawasan dengan mayoritas penghuni musiman atau liar termasuk dalam kategori kumuh. Karenanya penilaian tingkat kekumuhan harus terdiri dari kombinasi dari beberapa indikator kumuh yang ada. Pesatnya pertumbuhan daerah perkotaan menjadi salah satu penyebab terjadinya persaingan dalam penggunaan lahan. Hal ini menimbulkan penyalahgunaan lahan, misalnya antara penggunaan lahan untuk perumahan dengan penggunaan lahan untuk industri, atau penggunaan lahan untuk ruang terbuka hijau, pemukiman atau perkantoran. Dalam hal ini, penggunaan lahan di Jakarta termasuk dalam kategori tinggi. alih fungsi lahan terjadi ketika ada pembangunan di Jakarta misalkan lahan kosong yang dahulu digunakan untuk anak-anak bermain sepak bola dan setelah itu beralih fungsi menjadi perumahan. Pemukiman kumuh di DKI Jakarta ini dapat ditemukan di daerah pinggiran sungai. Selain itu, dapat ditemukan di kolong jembatan layang dan daerah pinggiran rel kereta api. Rumah rumah kumuh ini biasanya berbentuk gubuk yang terbuat dari triplek kayu pada dinding-dindingnya. Adapun ciri-ciri dari permukiman kumuh tersebut diantaranya, sanitasi atau masalah kebersihan di wilayah permukiman kumuh tidak memadai. Masalah sampah turut memperparah kondisi permukiman kumuh ini. Banyak sampah-sampah yang tidak terurus dan tidak ada tempat pembuangan sampah

di pemukiman kumuh. Hampir seluruh wilayah di DKI Jakarta terdapat lingkungan permukiman kumuh. Di Jakarta Pusat, pemukiman kumuh terdapat di Kecamatan Senen, Kemayoran dan Johar Baru atau tepatnya di Kelurahan Petojo Selatan. Di wilayah Jakarta Timur, ada di Kelurahan Cipinang Melayu, Cipinang, Cempedak, Pisangan Baru, Kayu Manis, dan Pisangan Timur. Di Jakarta Selatan terdapat di Kecamatan Kebayoran Lama, Mampang Prapatan dan Pancoran. Di Jakarta Utara terdapat di Kecamatan Koja, Tanjung Priok, Pademangan, Cilincing, dan Penjaringan. Sedangkan di Jakarta Barat ada di Kecamatan Angke, Duri Utara, Tambora, Kapuk dan Rawa Buaya. Berdasarkan data monografi kelurahan 2017 Kelurahan Pademangan Barat adalah salah satu Kelurahan yang berada di kota DKI Jakarta tepatnya di Jakarta Utara yang memiliki luas wilayah 353,35 Ha, dengan jumlah penduduk sebanyak 88,767 jiwa, yang di antaranya ada beberapa titik diwilayahnya memiliki kawasan permukiman kumuh. Salah satu yang merasakan dampak dari urbanisasi perkotaan yang berdampak terhadap permukiman kumuh di Pademangan adalah Kelurahan Pademangan Barat, karena dengan kebutuhan lahan yang semakin meningkat membuat ketersediaan lahan tidak mencukupi, sehingga timbulnya permukiman kumuh dan padat penduduk. Kelurahan ini memiliki luas 353,35 Ha dengan jumlah penduduk 88,767 jiwa, yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 45,725 jiwa dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 43,042 jiwa, dengan kepadatan penduduk rata-rata 895 jiwa per hektar. Permukiman kumuh merupakan permasalahan yang sangat pelik terjadi di kota atau perkotaan dimana permasalahan tersebut sangat mengancam bagi keberlangsungan hidup di kota, mulai dari kesehatan, kejahatan, kemiskinan dan serta kurang memperhatikan kelengkapan sarana dan prasarana lingkungan, maka dari itu untuk menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh dalam perkembangan wilayah dan kota yang tidak dapat dihindari maka perlu di lakukan upaya-upaya komprehensif yang menyangkut berbagai aspek yang mampu menghambat pertumbuhan atau menyelesaikan permasalahan kumuh tersebut. Dalam pembuktiannya dapat dilihat dari tujuh kriteria yang menjadi permukiman kumuh dari aspek fisik mulai dari bangunan, jalan, drainase, limbah, air bersih, persampahan, proteksi kebakaran. Berdasarkan data diatas terdapat beberapa Rukun Warga (RW) Kelurahan Pademangan Barat yang terindikasi kumuh dan menjadi titik pusat penelitian yaitu RW 10, dan 11. Hal ini yang melatar belakangi penulis dalam penelitian yang berjudul Analisis Penanganan Permukiman Kumuh di Kelurahan Pademangan Barat.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dipaparkan, maka rumusan masalah adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Pademangan Barat?
2. Bagaimana solusi penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Pademangan Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Pademangan Barat.
2. Membuat solusi penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Pademangan Barat.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada penyusun kebijakan tentang bagaimana penataan kawasan kumuh di Kelurahan Pademangan Barat.
2. Bagi pemerintah DKI Jakarta diharapkan hasil dari penelitian ini dapat menjadi masukan, terutama dalam rangka mengatasi masalah penanganan kawasan kumuh di Jakarta.
3. Bagi masyarakat diharapkan akan terciptanya suatu permukiman yang sehat, aman, nyaman, dan terjadi kelangsungan hidup yang lebih baik serta tidak ada kesenjangan.
4. Bagi akademik untuk menunjang proses belajar mengajar dan untuk pengembangan penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik sama.

## **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

### **1.5.1 Ruang lingkup wilayah**

Ruang lingkup wilayah yang di kaji pada penelitian ini adalah Kelurahan Pademangan Barat Kecamatan Pademangan Jakarta Utara wilayah yang tingkat permukiman kumuhnya padat penduduknya. Pemerintah Kelurahan Pademangan Barat merupakan bagian dari Wilayah Kecamatan Pademangan Kota Administrasi Jakarta Utara yang secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Wilayah Kelurahan Pademangan Barat memiliki luas  $\pm$  353,35 ha dan jumlah penduduk sebanyak 88,767 jiwa yang terbagi dalam 16 RW dan 213 RT.(Gambar Peta 1.1 dan 1.2)

Adapun batasan-batasan wilayah administrasi kelurahan Pademangan Barat Sebagai Berikut :

- Sebelah Barat : Kelurahan Ancol
- Sebelah Timur : Kelurahan Pademangan Timur
- Sebelah Utara : Kelurahan Mangga Dua Selatan
- Sebelah Selatan : Kelurahan Gunung Sahari Utara

### **1.5.2 Ruang Lingkup Substansi**

Wilayah sesuai dengan tujuan penelitian ini, maka ruang lingkup substansi penelitian ini meliputi:

- Mengidentifikasi permasalahan permukiman kumuh di Kelurahan Pademangan Barat mengenai aspek kawasan kumuh yang terdiri dari: bangunan, jalan, drainase, air limbah, air bersih, persampahan dan proteksi kebakaran.
- Memberikan alternati solusi atau arahan peningkatan kualitas permukiman kumuh

